

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar (*archipelago*), perairan yang terdiri atas sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, serta udara guna menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. (Herdiyeni, dkk, 2014:163).

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. (Aminah, 2006:163).

Terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut juga perlu dilakukan secara berkesinambungan, dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat. Dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut, sekaligus mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu. Dengan adanya transportasi, pendistribusian barang dan hasil-hasil produksi dapat dilakukan ke seluruh daerah secara merata, sehingga dapat meningkatkan pendapatan regional. (Ilham, 2015:163).

Sesuatu hal apa pun itu pasti memiliki permasalahan, sama halnya dengan sistem transportasi laut. Permasalahan seperti lambatnya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi laut atau ketersediaan infrastruktur yang sangat terbatas, keterlambatan (*delay*) dan pencemaran perairan, polusi udara merupakan sebagian dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan masalah transportasi laut tersebut.

Kegiatan pelaksanaan lalu lintas angkutan laut perlu meminta izin Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Salah satu peran KSOP adalah membuat kelancaran sistem transportasi laut yang ada tanpa adanya gangguan secara sengaja maupun tidak disengaja, karena kelancaran sistem transportasi laut mempengaruhi efektivitas kedatangan dan keberangkatan kapal, semakin banyak laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada kantor KSOP akan memperlancar sistem transportasi laut di pelabuhan.

Kelancaran sistem transportasi laut yang dilaksanakan semakin baik maka lalu lintas angkutan laut baik yang datang dan berangkat untuk melakukan bongkar muat lancar. Ketika sistem transportasi laut lancar maka kapal-kapal yang akan melakukan bongkar muat terjadwal dengan benar. Kelancaran sistem transportasi laut diukur dari banyak sedikitnya kegiatan lalu lintas angkutan laut yang datang dan berangkat, jika semakin banyak kapal yang melakukan bongkar muat secara terjadwal dan tepat waktu maka kelancaran sistem transportasi laut semakin efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa faktor yang digunakan untuk menjaga kelancaran sistem transportasi laut antara lain administrasi pelabuhan, kewenangan pemerintah, pengembangan infrastruktur.

Untuk menunjang sistem transportasi laut yang baik perlu didukung oleh berbagai sarana maupun fasilitas yang diperlukan, dalam pelaksanaan tugas maupun kegiatan. Baik dalam kegiatan bongkar muat barang maupun, kegiatan melakukan berbagai pengawasan, koordinasi, sarana dan fasilitas serta peralatan yang canggih dan modern sangat menentukan sekali. Sehingga akan mengurangi dan memperkecil kekeliruan dan kesalahan yang dialami.

Indonesia melakukan pengaturan pelayaran. Aturan tersebut di buat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan, di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang salah satu tujuannya adalah memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan. Pemerintah telah mengatur keselamatan dan keamanan sedemikian rupa dari segi

kelayakan kapal, segi navigasi, untuk menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran, agar pelayaran berjalan dengan baik dan aman.

Pembangunan infrastruktur suatu wilayah dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumber daya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. (Sudaryadi, 2007:434). Infrastruktur atau sarana dan prasarana memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region.

Infrastruktur di pelabuhan Tegal sudah cukup baik dengan adanya fasilitas pendukung yang ada, namun hanya bisa menerima kapal penangkap ikan dan kapal tongkang batu bara serta kapal niaga yang *gross tonnage* di bawah 10.000, maka dari itu diperlukan pengembangan infrastruktur yang ada agar kapal-kapal besar bisa masuk serta di sediakan lapangan penumpukan untuk kontainer dan gudang. Administrasi di pelabuhan Tegal sudah berjalan baik, dengan tertibnya para pemilik kapal dan agen kapal melaporkan data kapal datang maupun berangkat kepada pihak-pihak pelabuhan seperti kepada kantor KSOP, Pelindo, Bea Cukai, dll. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran sistem transportasi laut yang ada, karena jika salah satu menghambat akan berpengaruh terhadap kelancaran sistem transportasi laut yang ada. Kewenangan pemerintah di pelabuhan Tegal mengacu pada UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan. Pemerintah memberikan perlindungan dan keamanan kapal masuk di pelabuhan Tegal sampai kapal meninggalkan pelabuhan Tegal.

Tetapi pemerintah juga memberikan sanksi terhadap kapal-kapal yang tidak menaati peraturan yang ada di pelabuhan Tegal.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tegal akan mengusahakan kelancaran sistem transportasi laut untuk mengefektivitas kapal, baik yang datang maupun berangkat. Peningkatan produktifitas lalu lintas angkutan laut di pelabuhan Tegal dilakukan oleh petugas KSOP dengan memeriksa sistem transportasi laut yang ada dari mulai kapal datang sampai kapal meninggalkan pelabuhan dan waktu pelaksanaan kapal bongkar muat. Pengecekan muatan kapal, dengan memanfaatkan fasilitas dan alat yang ada dan masih layak untuk memeriksa, agen kapal yang memenuhi syarat kelengkapan sertifikasi kapal, jumlah crew kapal serta perlengkapannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengambil judul penelitian

“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS KEGIATAN KAPAL TERHADAP SISTEM TRANSPORTASI LAUT (Studi kasus Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Faktor Administrasi Pelabuhan berpengaruh terhadap Kelancaran Sistem Transportasi Laut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal ?
2. Apakah Faktor Kewenangan Pemerintah berpengaruh terhadap Sistem Transportasi Laut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal ?
3. Apakah Faktor Pengembangan Infrastruktur berpengaruh terhadap Sistem Transportasi Laut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Faktor Administrasi Pelabuhan terhadap Sistem Transportasi Laut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.
2. Menganalisis pengaruh Faktor Kewenangan Pemerintah terhadap Sistem Transportasi Laut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.
3. Menganalisis pengaruh Faktor Pengembangan Infrastruktur terhadap Sistem Transportasi Laut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam poin-poin sebagai berikut ini:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan, dan juga untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Prodi Transportasi di Universitas Maritim “AMNI” Semarang.

2. Bagi UNIMAR “AMNI” Semarang

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi akademis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan informasi bagi Mahasiswa UNIMAR “AMNI” Semarang.

3. Bagi Kantor Kesyahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pihak manajemen KSOP Kelas IV Tegal dalam memberi kontribusi bagi pengembangan teori yang berhubungan dengan sistem transportasi laut.

4. Bagi Pembaca

Bisa digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan sistem transportasi laut.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang proposal ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan proposal ini. Adapun sistematika penulisan proposal tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang tinjauan pustaka, pengertian penelitian terdahulu, hipotesis, diagram alur penelitian serta kerangka pemikiran teoritis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian yang membahas variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian ini akan dibahas secara mendalam untuk mengetahui pengaruh variabel yang digunakan dan implikasi manajerial.

BAB 5 PENUTUP

Memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak yang berkaitan dengan sistem transportasi laut serta manajemen Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dalam pengawasan sistem transportasi laut.